



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan nomenklatur Dinas/Badan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Maros Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 4).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7458/B.Ortala tanggal 9 November 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros.
7. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Maros.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi.
13. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas.
- (2) Daftar nama-nama UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pada seluruh wilayah di Kabupaten Maros.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan dan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dipimpin oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas satuan pendidikan sekolah dasar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri melaksanakan fungsi:
- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - c. pengoordinasian, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi penyusunan program dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah dasar negeri;
 - d. pengelolaan, pembinaan kepegawaian organisasi dan tata laksana; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinir penyusunan SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan agar penyusunannya dilaksanakan dengan benar;
- g. melaksanakan pembinaan pengelolaan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan peraturan agar penyelenggaraannya dilaksanakan dengan benar;
- h. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- i. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan konsultasi, sesuai dengan aturan yang ada untuk kelancaran UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
- j. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri serta mencari alternatif penyelesaian masalah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik sesuai aturan yang ada untuk kelancaran UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang keterampilan dan keahlian masing – masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala serta menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi lain di luar UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 33 Tahun 2018 tentang Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

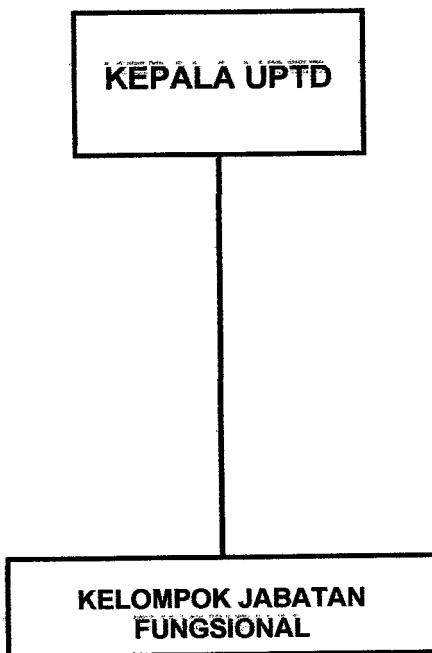
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :

- 1) UPTD SDN 1 Pakalu I;
- 2) UPTD SDN 2 Maros;
- 3) UPTD SDN 3 Maros;
- 4) UPTD SDN 4 Amarang;
- 5) UPTD SDN 5 Barandasi;
- 6) UPTD SDN 6 Watang Mallawa;
- 7) UPTD SDN 7 Patanyamang;
- 8) UPTD SDN 8 Sawaru;
- 9) UPTD SDN 9 Cenrana;
- 10) UPTD SDN 10 Watang Bengo;
- 11) UPTD SDN 11 Leang-Leang;
- 12) UPTD SDN 12 Pakalli;
- 13) UPTD SDN 14 Samanggi;
- 14) UPTD SDN 15 Jawi-Jawi;
- 15) UPTD SDN 16 Pangkasalo;
- 16) UPTD SDN 18 Belang-Belang;
- 17) UPTD SDN 19 Camba;
- 18) UPTD SDN 20 Panjallingan;
- 19) UPTD SDN 21 Sanggalea;
- 20) UPTD SDN 22 Maros;
- 21) UPTD SDN 23 Latebbu;
- 22) UPTD SDN 24 Batangase;
- 23) UPTD SDN 25 Padangalla;
- 24) UPTD SDN 26 Maddenge;
- 25) UPTD SDN 27 Bulu-Bulu;
- 26) UPTD SDN 28 Salenrang;
- 27) UPTD SDN 29 Marana;
- 28) UPTD SDN 30 Maros;
- 29) UPTD SDN 32 Sumpatu;
- 30) UPTD SDN 33 Ladange;
- 31) UPTD SDN 34 Pakere;
- 32) UPTD SDN 35 Pao-Pao;
- 33) UPTD SDN 36 Tangngaparang;
- 34) UPTD SDN 37 Panaikang;
- 35) UPTD SDN 38 Biringkaloro;
- 36) UPTD SDN 39 Kassi;
- 37) UPTD SDN 40 Janetaesa;

- 38) UPTD SDN 41 Laiya;
- 39) UPTD SDN 42 Cambaya;
- 40) UPTD SDN 43 Parrasangan Beru;
- 41) UPTD SDN 44 Padaria;
- 42) UPTD SDN 45 Pappaka;
- 43) UPTD SDN 46 Madello;
- 44) UPTD SDN 47 Kajuara;
- 45) UPTD SDN 48 Bonto Kapetta;
- 46) UPTD SDN 50 Dulang;
- 47) UPTD SDN 51 Tanete Langi;
- 48) UPTD SDN 52 Panasakkang;
- 49) UPTD SDN 53 Makkaraeng;
- 50) UPTD SDN 54 Abbalu;
- 51) UPTD SDN 55 Pammanjengan;
- 52) UPTD SDN 56 Pattontongan;
- 53) UPTD SDN 57 Bulu-Bulu;
- 54) UPTD SDN 58 Kappang;
- 55) UPTD SDN 59 Bonto Tengnga;
- 56) UPTD SDN 60 Moncongloe Lappara;
- 57) UPTD SDN 61 Batu Bassi;
- 58) UPTD SDN 62 Palisi;
- 59) UPTD SDN 63 Sambueja;
- 60) UPTD SDN 64 Malaka;
- 61) UPTD SDN 65 Matanre;
- 62) UPTD SDN 66 Kanjitongang;
- 63) UPTD SDN 67 Mario;
- 64) UPTD SDN 68 Kassijala;
- 65) UPTD SDN 69 Sikapaya;
- 66) UPTD SDN 70 Manjalling;
- 67) UPTD SDN 71 Inpres Lempangan;
- 68) UPTD SDN 72 Pakalu II;
- 69) UPTD SDN 73 Rea Toa;
- 70) UPTD SDN 74 Bonti-Bonti;
- 71) UPTD SDN 75 Malewang;
- 72) UPTD SDN 76 Uludaya;
- 73) UPTD SDN 77 Mahaka;
- 74) UPTD SDN 78 Tajo;
- 75) UPTD SDN 79 Mambue;
- 76) UPTD SDN 80 Kuri Lompo;
- 77) UPTD SDN 81 Bukamata;
- 78) UPTD SDN 82 Pattene;
- 79) UPTD SDN 83 Padang Setang;
- 80) UPTD SDN 84 Pammentengan;
- 81) UPTD SDN 85 Wanua Baru;
- 82) UPTD SDN 86 Mangarabombang;
- 83) UPTD SDN 88 Sabantang;
- 84) UPTD SDN 89 Rumbia;
- 85) UPTD SDN 90 Pangisoreng;
- 86) UPTD SDN 91 Ammesangeng;
- 87) UPTD SDN 92 Burrung;

- 88) UPTD SDN 93 Soreang;
- 89) UPTD SDN 95 Abbekae;
- 90) UPTD SDN 96 Carangki;
- 91) UPTD SDN 97 Inpres Tellumpanuae;
- 92) UPTD SDN 98 Inpres Kaluku;
- 93) UPTD SDN 99 Kadieng;
- 94) UPTD SDN 100 Inpres Balosi;
- 95) UPTD SDN 101 Inpres Ujung;
- 96) UPTD SDN 102 Inpres Cempaniga;
- 97) UPTD SDN 103 Inpres Hasanuddin;
- 98) UPTD SDN 104 Inpres Makkaraeng;
- 99) UPTD SDN 105 Inpres Alatengae;
- 100) UPTD SDN 106 Inpres Manarang;
- 101) UPTD SDN 107 Langkeang;
- 102) UPTD SDN 108 Moncongloe Home Base;
- 103) UPTD SDN 109 Inpres Lekoala;
- 104) UPTD SDN 110 Inpres Galaggara;
- 105) UPTD SDN 111 Inpres Polejiwa;
- 106) UPTD SDN 112 Inpres Turikale;
- 107) UPTD SDN 113 Inpres Barugae;
- 108) UPTD SDN 114 Baku;
- 109) UPTD SDN 115 Inpres Benteng Gajah;
- 110) UPTD SDN 116 Allu;
- 111) UPTD SDN 117 Inpres Kurusumange;
- 112) UPTD SDN 118 Inpres Matajang;
- 113) UPTD SDN 119 Ir Wasito;
- 114) UPTD SDN 120 Inpres Parengki;
- 115) UPTD SDN 121 Inpres Kalabbirang;
- 116) UPTD SDN 122 Inpres Parigi;
- 117) UPTD SDN 123 Inpres Macowa;
- 118) UPTD SDN 125 Marampesu;
- 119) UPTD SDN 126 Inpres Kariango;
- 120) UPTD SDN 127 Inpres Moncongloe;
- 121) UPTD SDN 128 Inpres Minasa Baji;
- 122) UPTD SDN 129 Inpres Bantimurung;
- 123) UPTD SDN 130 Inpres Gantanrang;
- 124) UPTD SDN 131 Inpres Tobonggae;
- 125) UPTD SDN 132 Inpres Lalang Tedong;
- 126) UPTD SDN 133 Inpres Talawe;
- 127) UPTD SDN 134 Puca;
- 128) UPTD SDN 135 Inpres Simbang;
- 129) UPTD SDN 136 Inpres Bonto Tallasa;
- 130) UPTD SDN 137 Inpres Kaemba;
- 131) UPTD SDN 138 Inpres Puca;
- 132) UPTD SDN 139 Inpres Lambatorang;
- 133) UPTD SDN 140 Inpres Maccina;
- 134) UPTD SDN 142 Talamangape;
- 135) UPTD SDN 143 Inpres Leko;
- 136) UPTD SDN 144 Holiang;
- 137) UPTD SDN 145 Inpres Pampangan;

- 138) UPTD SDN 146 Barambang I;
- 139) UPTD SDN 148 Inpres Bontoa;
- 140) UPTD SDN 150 Inpres Toddopulia;
- 141) UPTD SDN 151 Inpres Sabantang;
- 142) UPTD SDN 152 Inpres Baddo ujung;
- 143) UPTD SDN 153 Inpres Rompegading;
- 144) UPTD SDN 154 Inpres Tumalia;
- 145) UPTD SDN 155 Inpres Bonto Panno;
- 146) UPTD SDN 156 Inpres Tamalallang;
- 147) UPTD SDN 157 Inpres Nahung;
- 148) UPTD SDN 158 Inpres Allu;
- 149) UPTD SDN 159 Inpres Tekolabbua;
- 150) UPTD SDN 160 Inpres Lemo - Lemo;
- 151) UPTD SDN 162 Inpres Kampala;
- 152) UPTD SDN 163 Inpres Batu Putih;
- 153) UPTD SDN 164 Inpres Lappa Warue;
- 154) UPTD SDN 167 Samaenre;
- 155) UPTD SDN 168 Inpres Jambua;
- 156) UPTD SDN 170 Inpres Pangembang;
- 157) UPTD SDN 171 Inpres Kaluku;
- 158) UPTD SDN 172 Inpres Limapoccoe;
- 159) UPTD SDN 173 Inpres Mangngai;
- 160) UPTD SDN 174 Inpres Bungaeja;
- 161) UPTD SDN 175 Inpres Mamampang;
- 162) UPTD SDN 176 Inpres Tallasa;
- 163) UPTD SDN 177 Inpres Borong Kaluku;
- 164) UPTD SDN 180 Pappandangan;
- 165) UPTD SDN 181 Inpres Kampung Tangnga;
- 166) UPTD SDN 182 Inpres Bentenge;
- 167) UPTD SDN 183 Inpres Mangngai;
- 168) UPTD SDN 184 Inpres Tanete;
- 169) UPTD SDN 185 Inpres Salomatti;
- 170) UPTD SDN 186 Inpres Bonto Manai;
- 171) UPTD SDN 187 Inpres Rumbia;
- 172) UPTD SDN 188 Inpres Bonto Kapping;
- 173) UPTD SDN 189 Inpres Cambajawa;
- 174) UPTD SDN 191 Inpres Batunapara;
- 175) UPTD SDN 192 Inpres Takkalasi;
- 176) UPTD SDN 193 Inpres Pasandang;
- 177) UPTD SDN 194 Inpres Sossoe;
- 178) UPTD SDN 195 Inpres Sabila;
- 179) UPTD SDN 196 Sudirman;
- 180) UPTD SDN 197 Rea Malempo;
- 181) UPTD SDN 198 Inpres Suli -Suli;
- 182) UPTD SDN 200 Masale;
- 183) UPTD SDN 201 Inpres Tammu-Tammu;
- 184) UPTD SDN 202 Inpres Pattallassang;
- 185) UPTD SDN 203 Inpres Binanga Sangkara;
- 186) UPTD SDN 204 Inpres Rea Rea;
- 187) UPTD SDN 205 Inpres Moncong Jai;

- 188) UPTD SDN 206 Inpres Bassikalling;
- 189) UPTD SDN 207 Inpres Pajjaiang;
- 190) UPTD SDN 209 Inpres Garantiga;
- 191) UPTD SDN 210 Inpres Bontokamase;
- 192) UPTD SDN 212 Inpres Pangkajene;
- 193) UPTD SDN 213 Inpres Sanggalea;
- 194) UPTD SDN 214 Inpres Bawalangiri;
- 195) UPTD SDN 215 Inpres Taipa;
- 196) UPTD SDN 217 Inpres Pamelakkang Jene;
- 197) UPTD SDN 218 Inpres Dulang;
- 198) UPTD SDN 219 Inpres Pannambungan;
- 199) UPTD SDN 221 Inpres Rammang-Rammang;
- 200) UPTD SDN 222 Inpres Pao-Pao;
- 201) UPTD SDN 223 Inpres Tangkuru;
- 202) UPTD SDN 224 Inpres Lekoboddong;
- 203) UPTD SDN 225 Inpres Panaikang;
- 204) UPTD SDN 226 Inpres Lopi-Lopi;
- 205) UPTD SDN 227 Inpres Bonto Cina;
- 206) UPTD SDN 228 Inpres Salu;
- 207) UPTD SDN 229 Inpres Cambaya;
- 208) UPTD SDN 231 Inpres Tanah Tekko;
- 209) UPTD SDN 232 Inpres Marusu;
- 210) UPTD SDN 233 Inpres Bontomaero;
- 211) UPTD SDN 234 Barambang II;
- 212) UPTD SDN 237 Labongke;
- 213) UPTD SDN 238 Inpres Bontoparang;
- 214) UPTD SDN 239 Inpres Nipa;
- 215) UPTD SDN 240 Baddo-Baddo;
- 216) UPTD SDN 241 Inpres Perumnas Tumalia;
- 217) UPTD SDN 242 Inpres Damma;
- 218) UPTD SDN 243 Baruga;
- 219) UPTD SDN 244 Pangia;
- 220) UPTD SDN 245 Cabbella;
- 221) UPTD SDN 246 Bonto-Bonto;
- 222) UPTD SDN 247 Pattiro;
- 223) UPTD SDN 248 Paccinikang;
- 224) UPTD SDN 249 Cindakko.

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM